YAYASAN
PENDIDIKAN TINGGI DHARMA WIRAWAN KALIMANTAN TIMUR - YAPENTI DWK
Jl. Pupuk Raya, Komplek Kampus Universitas Balikpapan, Kel. Gunung Bahagia. Balikpapan
Telp.0542-765457 Fax. 0542-765457 76114 E-mail: yapentidwk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI DHARMA WIRAWAN
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : SKEP/64/PEMBINA/YAPENTI-DWK/VIII/2026

TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BALIKPAPAN

PEMBINA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI DHARMA WIRAWAN KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

a. Bahwa perguruan tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi memiliki kewajiban untuk menegakkan tata nilai, moralitas, dan integritas akademik guna mewujudkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, bermartabat, dan berintegritas;

b. Bahwa dalam rangka menjaga marwah akademik, mencegah pelanggaran akademik dan non-akademik, serta memberikan pedoman perilaku yang jelas bagi mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen, diperlukan suatu pengaturan mengenai Kode Etik Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Dosen di lingkungan Universitas Balikpapan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi DWK tentang Kode Etik Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Dosen di Lingkungan Universitas Balikpapan;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
d. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan Sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2024 (dan/atau perubahan serta peraturan pelaksana terkait pendidikan tinggi yang berlaku) tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
i. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
j. Statuta Universitas Balikpapan Tahun 2020

Memperhatikan : Perkembangan dan dimanika dilingkungan Universitas Balikpapan berkaitan dengan Etika Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Dosen.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI DWK TENTANG KODE ETIK MAHASISWA, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BALIKPAPAN

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Standar Operasional dan Prosedur ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur (YAPENTI DWK).
2. Universitas adalah Universitas Balikpapan sebagai satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan.
3. Rektorat adalah unsur pimpinan Universitas yang meliputi Rektor dan Wakil Rektor beserta divisi yang berada langsung di bawah koordinasinya.
4. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Balikpapan.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang menempuh pendidikan pada program studi di lingkungan Universitas Balikpapan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang mengabdi pada Universitas Balikpapan.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas, meliputi tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga penunjang akademik lainnya.
8. Kode Etik adalah pedoman tertulis mengenai nilai, norma, sikap dan perilaku yang wajib dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh Mahasiswa, Tenaga

Kependidikan dan Dosen dalam menjalankan kegiatan tridharma perguruan tinggi maupun kehidupan bermasyarakat.

9. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perbuatan, sikap, ucapan, dan/atau tindakan Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen yang bertentangan dengan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Yayasan ini.
10. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah unsur pimpinan Universitas yang menaungi urusan kemahasiswaan dan bertugas menindaklanjuti laporan/temuan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mahasiswa.
11. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia adalah unsur pimpinan Universitas yang menaungi urusan sumber daya manusia dan bertugas menindaklanjuti laporan/temuan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen.
12. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Satgas PPKPT adalah satuan tugas yang dibentuk di lingkungan Universitas untuk mencegah dan menangani kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Sanksi adalah konsekuensi yang dikenakan kepada Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan/atau Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
14. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Dosen disusun berdasarkan asas:

a. ketuhanan Yang Maha Esa;
b. kejujuran dan integritas akademik;
c. profesionalitas dan tanggung jawab;
d. kepatutan dan kesusilaan;
e. penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
f. kesetaraan dan non-diskriminasi.

Pasal 3

Peraturan Yayasan ini bertujuan untuk:

a. menjadi pedoman perilaku bagi Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Dosen dalam melaksanakan tugas dan tridharma perguruan tinggi;
b. mewujudkan iklim akademik yang sehat, kondusif, dan bermartabat di lingkungan Universitas;
c. mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran etika, akademik, dan hukum di lingkungan Universitas;
d. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, Dosen, dan sivitas akademika lainnya; dan
e. menjaga nama baik dan marwah Universitas serta Yayasan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Yayasan ini meliputi:

a. Kode Etik Mahasiswa;
b. Kode Etik Tenaga Kependidikan;
c. Kode Etik Dosen;
d. bentuk-bentuk pelanggaran;
e. mekanisme penegakan Kode Etik; dan
f. jenis dan tingkatan sanksi.

BAB III

KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu

Hak Mahasiswa

Pasal 5

Setiap Mahasiswa berhak:

a. memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan akademik, dan pelayanan administrasi yang bermutu sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan;
b. memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
c. menyampaikan pendapat dan/atau berorganisasi secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku;
d. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil; dan

e. mendapatkan pembelaan yang layak dalam hal diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Bagian Kedua

Kewajiban Mahasiswa

Pasal 6

Setiap Mahasiswa wajib:

a. menjunjung tinggi nilai kejujuran akademik dalam setiap proses pembelajaran, penelitian, dan penulisan karya ilmiah, termasuk larangan plagiarisme, perjokian dan pemalsuan data;
b. menghormati dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan masyarakat;
c. menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan lingkungan kampus;
d. menaati seluruh peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku di Universitas;
e. menjaga nama baik pribadi, keluarga, Universitas dan Yayasan; dan
f. berpakaian sopan, rapi dan pantas sesuai dengan norma kesusilaan serta ketentuan tata cara berpakaian yang berlaku di lingkungan Universitas.

Bagian Ketiga

Larangan bagi Mahasiswa

Pasal 7

Setiap Mahasiswa dilarang:

a. melakukan tindakan plagiarisme, manipulasi data dan/atau kecurangan akademik dalam bentuk apa pun;
b. melakukan perundungan (*bullying*), pelecehan, dan/atau kekerasan baik fisik, verbal, maupun daring (*cyberbullying*) terhadap sesama sivitas akademika;
c. melakukan tindakan asusila, pelecehan seksual dan/atau kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi;
d. menyalahgunakan, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta minuman beralkohol di lingkungan kampus;
e. membawa, menyimpan, dan/atau menggunakan senjata tajam maupun senjata api tanpa izin di lingkungan kampus;

f. melakukan tindakan yang mengarah pada radikalisme, intoleransi dan/atau tindak pidana lainnya; dan
g. melakukan pencemaran nama baik Universitas dan/atau Yayasan melalui media apa pun.

Bagian Keempat

Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Pasal 8

1. Mahasiswa hanya dapat melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum (unjuk rasa) di lingkungan Universitas apabila permintaan dialog dengan pihak Universitas yang telah diajukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak mendapatkan tanggapan.
2. Permintaan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pimpinan Universitas dengan tenggang waktu yang wajar antar-permintaan, serta didokumentasikan sebagai bukti telah ditempuhnya upaya dialog.
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, kegiatan penyampaian pendapat di muka umum wajib tetap dilaksanakan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab, serta tidak mengganggu proses tridharma perguruan tinggi maupun hak-hak sivitas akademika lainnya, dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian pendapat di muka umum.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dan/atau ayat (3), termasuk penyelenggaraan unjuk rasa tanpa didahului upaya dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum di lingkungan Universitas dan digolongkan sebagai pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c.

BAB IV

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Hak Tenaga Kependidikan

Pasal 9

Setiap Tenaga Kependidikan berhak:

a. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan jenjang karier sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Yayasan;

b. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan;
c. memperoleh perlindungan hukum, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam melaksanakan tugas;
d. memperoleh fasilitas dan sarana kerja yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas; dan
e. mendapatkan pembelaan yang layak dalam hal diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Bagian Kedua

Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Setiap Tenaga Kependidikan wajib:

a. memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional bagi Mahasiswa dan Dosen dalam setiap urusan administrasi, akademik, maupun kemahasiswaan;
b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara jujur, disiplin, dan penuh dedikasi sesuai dengan bidang kerja masing-masing;
c. menjaga kerahasiaan data pribadi Mahasiswa, Dosen, dan informasi kampus sesuai peraturan perundang-undangan;
d. bersikap sopan, adil, dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh sivitas akademika;
e. menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan sarana serta prasarana Universitas;
f. berpakaian rapi, sopan, dan sesuai dengan ketentuan tata cara berpakaian yang berlaku di lingkungan Universitas selama menjalankan tugas; dan
g. menaati kode etik, statuta dan peraturan Universitas serta Yayasan.

Bagian Ketiga

Larangan bagi Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Setiap Tenaga Kependidikan dilarang:

a. menunda, mempersulit, dan/atau menelantarkan pelayanan administrasi kepada Mahasiswa dan Dosen tanpa alasan yang sah;
b. menerima gratifikasi, suap, dan/atau imbalan dalam bentuk apa pun terkait pelayanan yang menjadi tugasnya;

c. melakukan perundungan *(bullying)*, pelecehan dan/atau kekerasan baik fisik, verbal, maupun daring terhadap sesama sivitas akademika;
d. menyalahgunakan wewenang dan/atau akses data untuk kepentingan pribadi maupun golongan;
e. melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan/atau kondisi fisik dalam memberikan pelayanan; dan
f. melakukan pencemaran nama baik Universitas dan/atau Yayasan melalui media apa pun.

BAB V

KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu

Hak Dosen

Pasal 12

Setiap Dosen berhak:

a. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber daya, dan kenaikan jabatan akademik/pangkat sesuai peraturan perundang-undangan;
b. memperoleh kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab;
c. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan;
d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual; dan
e. mendapatkan pembelaan yang layak dalam hal diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Bagian Kedua

Kewajiban Dosen

Pasal 13

Setiap Dosen wajib:

a. melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan kompetensi keilmuan;
b. memberikan pelayanan yang profesional kepada mahasiswa, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar dan bimbingan tugas akhir;

c. menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas dan integritas akademik dalam pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, termasuk larangan plagiarisme dan manipulasi data penelitian;
d. bersikap adil, tidak diskriminatif, dan memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa;
e. menjadi teladan dalam sikap, tutur kata, dan perilaku bagi mahasiswa dan masyarakat;
f. menjaga hubungan profesional dengan mahasiswa tanpa penyalahgunaan relasi kuasa (*abuse of power*);
g. berpakaian rapi, sopan dan pantas sesuai dengan norma kesusilaan serta ketentuan tata cara berpakaian yang berlaku di lingkungan Universitas selama melaksanakan tugas;
h. menaati kode etik dosen, statuta, dan peraturan Universitas serta Yayasan; dan
i. menjaga kerahasiaan data pribadi mahasiswa dan informasi kampus sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan bagi Dosen

Pasal 14

Setiap Dosen dilarang:

a. melakukan plagiarisme, fabrikasi, dan/atau falsifikasi data dalam karya ilmiah dan penelitian;
b. menyalahgunakan relasi kuasa untuk memaksa, mengintimidasi, dan/atau melakukan pelecehan seksual maupun kekerasan seksual terhadap mahasiswa dan/atau sivitas akademika lainnya;
c. menerima gratifikasi, suap, dan/atau imbalan dalam bentuk apa pun terkait proses akademik dan penilaian mahasiswa;
d. melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan/atau kondisi fisik mahasiswa;
e. menyalahgunakan wewenang akademik untuk kepentingan pribadi maupun golongan; dan
f. melakukan pencemaran nama baik Universitas dan/atau Yayasan melalui media apa pun.

BAB VI

BENTUK DAN KATEGORI PELANGGARAN

Pasal 15

Pelanggaran Kode Etik digolongkan ke dalam:

a. pelanggaran ringan, yaitu pelanggaran yang berdampak pada diri sendiri dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain;
b. pelanggaran sedang, yaitu pelanggaran yang berdampak pada proses akademik dan/atau merugikan pihak lain namun tidak memenuhi unsur tindak pidana; dan
c. pelanggaran berat, yaitu pelanggaran yang bertentangan dengan norma kesusilaan, memenuhi unsur tindak pidana, dan/atau merusak nama baik Universitas dan Yayasan secara signifikan.

BAB VII

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 16

1. Laporan/temuan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mahasiswa disampaikan kepada Rektor untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
2. Laporan/temuan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen disampaikan kepada Rektor untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia.
3. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2), laporan/temuan dugaan pelanggaran berupa kekerasan dan/atau pelecehan seksual disampaikan dan ditangani melalui Satgas PPKPT sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berwenang melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas laporan/temuan, serta memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
5. Dalam hal yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik adalah Rektor, laporan/temuan disampaikan langsung kepada Yayasan untuk diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Yayasan berdasarkan peraturan

perundang-undangan, Statuta Universitas, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

BAB VIII

MEKANISME PEMERIKSAAN DAN PEMBELAAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pemeriksaan dan Pembelaan

Pasal 17

1. Setiap laporan/temuan dugaan pelanggaran Kode Etik disampaikan secara tertulis kepada Rektor melalui unit kerja yang ditunjuk, untuk selanjutnya diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
3. Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan/atau Dosen yang diduga melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan pembelaan diri.
4. Proses pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup untuk melindungi privasi pihak-pihak yang terlibat, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
5. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor dalam bentuk rekomendasi untuk ditindaklanjuti dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Jalur Pelaporan Khusus

Pasal 18

1. Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan/atau Dosen yang mengalami kekerasan dan/atau pelecehan seksual di lingkungan Universitas dapat membuat laporan tertulis kepada Satgas PPKPT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
2. Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan/atau Dosen yang mengalami perundungan (*bullying*) dapat menyampaikan laporan sesuai dengan

mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan kedudukan pihak yang diduga sebagai pelaku.

3. Mahasiswa yang menjadi korban pungutan liar di lingkungan Universitas dapat menyampaikan laporan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
4. Laporan/temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing penerima laporan dan dapat diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Satgas PPKPT, dan/atau aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi pelanggaran Kode Etik dan/atau tindak pidana.
5. Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berhak atas perlindungan kerahasiaan identitas dan perlindungan dari tindakan balasan dalam bentuk apa pun.
6. Jalur pelaporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan hak Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan/atau Dosen untuk menyampaikan laporan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
7. Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen yang menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual, dan/atau perundungan (*bullying*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas.
8. Dalam hal Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan/atau Dosen diduga sebagai pelaku kekerasan, pelecehan seksual, dan/atau perundungan (*bullying*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan kedudukannya berdasarkan Peraturan Yayasan ini, tanpa mengurangi proses penanganan oleh Satgas PPKPT dan/atau aparat penegak hukum.

BAB IX

JENIS DAN TINGKATAN SANKSI

Pasal 19

Sanksi bagi Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

a. teguran lisan dan/atau tertulis;
b. pembatalan nilai akademik pada mata kuliah terkait;
c. penghentian dan/atau pencabutan layanan pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun instansi swasta;

d. skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
e. pemberhentian sebagai mahasiswa (drop out).

Pasal 20

Sanksi bagi Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

a. teguran lisan dan/atau tertulis;
b. penundaan hak-hak tertentu, termasuk kenaikan pangkat/golongan;
c. pembebasan sementara dari tugas dan/atau jabatan struktural;
d. pemberhentian sementara sebagai Tenaga Kependidikan; dan/atau
e. pemberhentian tetap sebagai Tenaga Kependidikan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 21

Sanksi bagi Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

a. teguran lisan dan/atau tertulis;
b. penundaan hak-hak tertentu, termasuk kenaikan pangkat/jabatan akademik;
c. pembebasan sementara dari tugas mengajar dan/atau tugas struktural;
d. pemberhentian sementara sebagai dosen; dan/atau
e. pemberhentian tetap sebagai dosen sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan tentang Dosen yang berlaku.

Pasal 22

1. Penjatuhan sanksi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat/kategori pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kecuali untuk pelanggaran berat yang dapat langsung dikenakan sanksi maksimal.
2. Dalam hal pelanggaran Kode Etik juga memenuhi unsur tindak pidana, penjatuhan sanksi administratif tidak menghapuskan proses hukum pidana yang berlaku.
3. Penetapan sanksi ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, dan/atau Satgas PPKPT sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB X

REHABILITASI DAN PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 23

1. Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen yang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berhak mendapatkan pemulihan nama baik.
2. Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor melalui surat keputusan dan/atau pengumuman resmi Universitas.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

1. Pedoman operasional baku, formulir pelaporan, dan tata cara pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Yayasan ini tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Yayasan ini.
2. Ketentuan teknis lain yang belum diatur dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, seluruh peraturan mengenai tata tertib dan/atau kode etik Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan/atau Dosen yang telah ada di lingkungan Universitas Balikpapan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Yayasan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 18 Agustus 2026

YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI DHARMA WIRAWAN KALIMANTAN TIMUR

Dr. H. RENDI SUSISWO ISMAIL S.E.,S.H.,M.H
P E M B I N A

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. *Ketua Yapenti-DWK;*
2. *Rektor*
3. *Arsip.*

Lampiran I : **SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI DHARMA WIRAWAN KALIMANTAN TIMUR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BALIKPAPAN PEDOMAN OPERASIONAL BAKU PENEGAKAN KODE ETIK**

Nomor : SKEP/64/PEMBINA/YAPENTI-DWK/VIII/2026

A. Ketentuan Umum

1. Pedoman ini menjadi acuan teknis bagi Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, dan Satgas PPKPT dalam menindaklanjuti laporan/temuan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Yayasan ini.
2. Penegakan Kode Etik dilaksanakan dengan berpedoman pada asas praduga tak bersalah, kerahasiaan, keadilan, imparsialitas, dan kepastian waktu penyelesaian.

B. Alur Pelaporan/temuan

1. Pelanggaran oleh Mahasiswa maka laporan/temuan disampaikan kepada Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
2. Pelanggaran oleh Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen maka laporan/temuan disampaikan kepada Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
3. Pelanggaran berupa kekerasan dan/atau pelecehan seksual maka laporan/temuan disampaikan langsung kepada Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1).
4. Pelanggaran berupa perundungan (*bullying*) maka laporan/temuan mengikuti alur sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 sesuai dengan kedudukan pihak yang diduga sebagai pelaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
5. Pelanggaran berupa pungutan liar terhadap Mahasiswa maka laporan/temuan disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
6. Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Rektor maka laporan/temuan disampaikan langsung kepada Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6).

C. Tahapan Penanganan dan Jangka Waktu

1. Penerimaan dan pencatatan laporan/temuan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak laporan diterima.
2. Verifikasi awal atas kelengkapan dan kelayakan laporan/temuan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan/temuan dicatat.
3. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak terlapor serta saksi, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak verifikasi awal selesai.
4. Penyusunan rekomendasi hasil pemeriksaan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan.
5. Penetapan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak rekomendasi diterima.
6. Penyampaian hasil kepada pelapor dan terlapor secara tertulis, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Rektor ditetapkan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 dapat diperpanjang untuk perkara yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam, dengan pemberitahuan tertulis kepada pelapor dan terlapor.

D. Kerahasiaan dan Perlindungan

1. Setiap pihak yang terlibat dalam proses penanganan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor, terlapor dan saksi.
2. Pelapor dilindungi dari tindakan balasan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).

E. Dokumentasi dan Pengarsipan

1. Setiap tahapan penanganan didokumentasikan dan diarsipkan oleh unit kerja yang ditunjuk Rektor.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

Lampiran II : **SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI DHARMA WIRAWAN KALIMANTAN TIMUR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BALIKPAPAN PEDOMAN OPERASIONAL BAKU PENEGAKAN KODE ETIK**

Nomor : SKEP/64/PEMBINA/YAPENTI-DWK/VIII/2026

FORMULIR PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Nomor Laporan	(diisi oleh penerima)
Tanggal Laporan	

I. Identitas Pelapor

Nama	
Status (Mahasiswa/Tenaga Kependidikan/Dosen)	
NIM / NIP / NIDN	
Program Studi / Unit Kerja	
Nomor Telepon/HP	
Alamat Surel (Email)	

II. Identitas Terlapor (jika diketahui)

Nama	
Status (Mahasiswa/Tenaga Kependidikan/Dosen/Rektor)	
Program Studi / Unit Kerja	

III. Uraian Dugaan Pelanggaran

Jenis dugaan pelanggaran (beri tanda √ pada kotak yang sesuai):

[ ] Pelanggaran akademik / kecurangan akademik

[ ] Perundungan (bullying)

[ ] Kekerasan

[ ] Pelecehan seksual / kekerasan seksual

[ ] Pungutan liar

[ ] Lainnya: .....

Waktu Kejadian	
Tempat Kejadian	

Kronologi Kejadian:

Bukti Pendukung (jika ada):

Nama Saksi (jika ada):

IV. Pernyataan Pelapor

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dari pihak mana pun, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya memahami bahwa identitas saya sebagai pelapor akan dilindungi kerahasiaannya sesuai dengan Peraturan Yayasan ini.

Pelapor,	Penerima Laporan,
(.....)	(.....)
Tanggal:	Tanggal: .....

Lampiran III : **SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI DHARMA WIRAWAN KALIMANTAN TIMUR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BALIKPAPAN PEDOMAN OPERASIONAL BAKU PENEGAKAN KODE ETIK**

Nomor : SKEP/64/PEMBINA/YAPENTI-DWK/VIII/2026

TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Tahap 1

Penerimaan Laporan

1. Laporan diterima secara tertulis melalui unit kerja yang ditunjuk Rektor dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
2. Penerima memberikan tanda terima kepada pelapor sebagai bukti laporan telah diterima.

Tahap 2

Verifikasi Awal

1. Unit kerja melakukan verifikasi kelengkapan dan kelayakan laporan, kemudian meneruskannya kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia atau Satgas PPKPT sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18.
2. Laporan yang belum memenuhi kelengkapan dapat dikembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Tahap 3

Pemanggilan Para Pihak

1. Pihak terlapor dipanggil secara tertulis untuk memberikan keterangan dan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
2. Pemanggilan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jadwal pemeriksaan.

Tahap 4

Pemeriksaan dan Klarifikasi

1. Pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup untuk melindungi privasi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
2. Pemeriksaan dapat melibatkan keterangan saksi dan/atau bukti pendukung lainnya.

3. Pihak terlapor diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan keterangan dan pembelaan diri.

Tahap 5

Penyusunan Rekomendasi

1. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan tertulis yang memuat kesimpulan dan rekomendasi sanksi, dalam hal terbukti melakukan pelanggaran, atau rekomendasi pemulihan nama baik, dalam hal tidak terbukti.
2. Rekomendasi disampaikan kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).

Tahap 6

Penetapan Keputusan

1. Rektor menetapkan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
2. Keputusan disampaikan secara tertulis kepada pelapor dan terlapor.

Tahap 7

Pelaksanaan dan Pengawasan

1. Sanksi yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh unit kerja terkait dan diawasi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan kewenangannya.
2. Dalam hal terlapor adalah Rektor, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6).

Lampiran IV : **SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI DHARMA WIRAWAN KALIMANTAN TIMUR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BALIKPAPAN PEDOMAN OPERASIONAL BAKU PENEGAKAN KODE ETIK**

Nomor : SKEP/64/PEMBINA/YAPENTI-DWK/VIII/2026

MATRIKS PELANGGARAN DAN SANKSI KODE ETIK

Matriks ini disusun untuk memberikan uraian yang jelas mengenai keterkaitan antara kategori pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 14, serta jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Yayasan ini.

Penetapan kategori dan sanksi tetap mempertimbangkan fakta, dampak, tingkat kesalahan, dan riwayat pelanggaran pada setiap kasus melalui mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Lampiran III. Untuk pelanggaran berat, sanksi dapat langsung dikenakan pada tingkat maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

A. Mahasiswa

Kategori	Bentuk Pelanggaran (Contoh)	Dasar Pasal	Sanksi
Ringan	Pelanggaran tata tertib administratif dan akademik yang tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, misalnya kelalaian ringan terhadap ketentuan Pasal 6.	Pasal 6; Pasal 15 ayat (1) huruf a	Teguran lisan dan/atau tertulis (Pasal 19 huruf a)
Sedang	Kecurangan akademik/plagiarisme; pencemaran nama baik Universitas dan/atau Yayasan.	Pasal 7 huruf a, g; Pasal 15 ayat (1) huruf b	Pembatalan nilai akademik dan/atau penghentian/pencabutan layanan beasiswa (Pasal 19 huruf b, c)
Sedang s.d. Berat	Perundungan (bullying); unjuk rasa tanpa didahului upaya dialog sesuai Pasal 8.	Pasal 7 huruf b;	Skorsing dalam jangka waktu tertentu, sesuai

Kategori	Bentuk Pelanggaran (Contoh)	Dasar Pasal	Sanksi
		Pasal 8 ayat (4)	tingkat dampak (Pasal 19 huruf d)
Berat	Asusila, pelecehan/kekerasan seksual; penyalahgunaan narkotika/psikotropika/minuman beralkohol; kepemilikan senjata tajam/api tanpa izin; radikalisme/tindak pidana lain.	Pasal 7 huruf c, d, e, f; Pasal 15 ayat (1) huruf c	Skorsing berat sampai dengan pemberhentian sebagai mahasiswa/drop out (Pasal 19 huruf d, e)

B. Tenaga Kependidikan

Kategori	Bentuk Pelanggaran (Contoh)	Dasar Pasal	Sanksi
Ringan	Pelayanan yang kurang optimal namun tidak disengaja dan tidak merugikan; kelalaian administratif ringan.	Pasal 10; Pasal 15 ayat (1) huruf a	Teguran lisan dan/atau tertulis (Pasal 20 huruf a)
Sedang	Menunda/mempersulit pelayanan tanpa alasan sah; diskriminasi dalam pelayanan; pencemaran nama baik.	Pasal 11 huruf a, e, f; Pasal 15 ayat (1) huruf b	Penundaan hak-hak tertentu dan/atau pembebasan sementara dari tugas/jabatan struktural (Pasal 20 huruf b, c)
Berat	Menerima gratifikasi/suap/pungutan liar; perundungan, kekerasan, dan/atau pelecehan seksual; penyalahgunaan wewenang/akses data.	Pasal 11 huruf b, c, d; Pasal 15 ayat (1) huruf c	Pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap (Pasal 20 huruf d, e)

C. Dosen

Kategori	Bentuk Pelanggaran (Contoh)	Dasar Pasal	Sanksi
Ringan	Kelalaian ringan dalam pelaksanaan tridharma yang tidak merugikan mahasiswa/Universitas.	Pasal 13; Pasal 15 ayat (1) huruf a	Teguran lisan dan/atau tertulis (Pasal 21 huruf a)
Sedang	Pelayanan tidak profesional dalam KBM/bimbingan tugas akhir; ketidakadilan dalam penilaian; diskriminasi.	Pasal 13 huruf b, d; Pasal 14 huruf d; Pasal 15 ayat (1) huruf b	Penundaan hak-hak tertentu dan/atau pembebasan sementara dari tugas mengajar/struktural (Pasal 21 huruf b, c)
Berat	Plagiarisme/fabrikasi/falsifikasi data penelitian; penyalahgunaan relasi kuasa untuk pelecehan/kekerasan seksual; menerima gratifikasi/suap; penyalahgunaan wewenang akademik.	Pasal 14 huruf a, b, c, e; Pasal 15 ayat (1) huruf c	Pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap sebagai dosen (Pasal 21 huruf d, e)

Untuk pelanggaran berupa kekerasan dan/atau pelecehan seksual, penanganan dilaksanakan melalui Satgas PPKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1), dengan sanksi kode etik tetap mengacu pada matriks di atas berdasarkan kedudukan pihak yang bersangkutan.

Lampiran I, Lampiran II Lampiran III, dan Lampiran IV ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi DWK .. tentang Kode Etik Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Dosen di Lingkungan Universitas Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 18 Agustus 2026

YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI DHARMA WIRAWAN
KALIMANTAN TIMUR

Dr. H. RENDI SUSISWO ISMAIL S.E.,S.H.,M.H
P E M B I N A

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. *Ketua Yapenti-DWK;*
2. *Rektor*
3. *Arsip.*